Analisis framing pemberitaan korupsi massal di media *online* detik.com

Muhammad Fairuz Satria Ananda, Suwandi Sumartias,
Aat Ruchiat Nugraha^{*)}

Universitas Padjadjaran

Km 21 Raya Bandung Sumedang, Jatinangor, Sumedang, Indonesia

Email: aatruchiat.nugraha@gmail.com/ Phone +6281221708147

How to Cite This Article: Ananda, M.F. et al. (2019). Analisis framing pemberitaan korupsi massal di media online detik.com. *Jurnal Studi Komunikasi*, 3(2). doi: 10.25139/jsk.3i2.1464

Received: 15-03-2019,
Revision: 22-04-2019,
Acceptance: 24-04-2019,
Published online: 02-07-2019

English Title: Framing Analysis of Mass Corruption News in Detik.Com Online Media

Abstract *This research aims to determine the construction of PDIP's image from the news framing on them as the party who has the most corrupted fraction members in the event of mass corruption case if the People's Legislative Council (DPRD) of Malang City by the online media, Detik.com. This research is conducted through constructivism paradigm with the study of framing analysis by Robert M. Entman as a conceptual foundation with the framing concept of Entman, namely, define problems, diagnose causes, make moral judgement, and treatment recommendation from journalist side; using the theory of the social mass media as a theoretical foundation. The results of the framing carried out by the online media, Detik.com tend to be neutral in delivering their news on the mass corruption case of the DPRD of Malang City in construction the image of PDIP as the most corrupted party. This is because the media deliver both side cover, even Detik.com's journalists already included opinions in the titles and selecting images in the news. Although Detik.com tends to be neutral, because Detik.com just deliver the facts. The bad image construction of PDIP has been constructed already, as the news is considered to be a bad news model.*

Keywords: Framing Analysis; Image Construction; Online Media; News

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi citra PDIP dari peminoritasan berita mengenai PDIP sebagai fraksi terbanyak yang anggotanya korupsi dalam peristiwa korupsi massal DPRD Kota Malang oleh media *online*

*) Corresponding Author

Detik.com. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan studi analisis *framing* Robert M. Entman sebagai landasan konseptual dengan konsepsi *framing* Entman yaitu pendefinisian masalah, memperkirakan penyebab, membuat

keputusan moral, dan menekankan penyelesaian dari sisi wartawan; menggunakan teori konstruksi sosial media massa sebagai landasan teoretis. Hasil penelitian dari *framing* yang dilakukan oleh media *online* Detik.com terhadap kasus korupsi massal DPRD Kota Malang dalam mengonstruksi citra PDIP sebagai partai yang paling banyak korupsi adalah cenderung netral karena memberitakan dengan *cover both side*, meskipun wartawan Detik.com memasukan opini dalam penulisan judul dan pemilihan gambar dalam berita. Walaupun cenderung keberpihakan Detik.com cenderung netral, karena Detik.com hanya memaparkan fakta. Namun, konstruksi citra buruk PDIP buruk cenderung terkonstruksi karena pemberitaan tersebut termasuk dalam model *bad news*.

Kata Kunci: Analisis Framing; Konstruksi Citra; Media Online; Pemberitaan

PENGANTAR

Masalah korupsi yang melibatkan aparat pemerintah, politisi, dan pengusaha beberapa kali menjadi *headline* pemberitaan di media massa cetak maupun elektronik di Indonesia. *Headline* tentang korupsi oleh pejabat pemerintahan yang terdapat di media massa telah memberikan penegasan bahwa masalah korupsi merupakan bagian dari patologi sosial masyarakat Indonesia yang perlu diperangi secara lebih serius baik dengan menggunakan instrumen hukum, agama, maupun sosial budaya. Disisi lain, korupsi sulit untuk dilacak dan terdeteksi secara empiris dikarenakan ada "tertutup" oleh suatu kepentingan yang saling berkaitan diantara para pelaku dengan sistem penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Selama ini korupsi telah terjadi di berbagai lembaga pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat pusat maupun daerah.

Menjelang tahun politik 2019 tepatnya pada September 2018 telah terjadi korupsi di lembaga terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang yang melibatkan hampir sebagian besar anggota DPRD yang ditangkap oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus korupsi yang menjerat 41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 ramai diberitakan di media massa, termasuk di media online. Peristiwa ini pun ditanggapi oleh media online Detik.com dengan menerbitkan berita yang berjudul "Miris! 41 dari 45 Anggota DPRD Kota Malang Jadi Tersangka Korupsi" pada Senin, 3 September 2018 pukul 17.41 WIB. Judul tersebut memberitakan tentang fakta penetapan status tersangka kepada 22 anggota DPRD Kota Malang yang menerima uang dari Walikota Malang nonaktif Moch. Anton terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (RAPBD-P) Kota Malang tahun 2015 dengan merilis daftar nama anggota DPRD Kota Malang yang terjerat kasus tersebut.

Hari berikutnya Detik.com menerbitkan dengan topik yang sama mengenai korupsi yang berjudul "Fenomena Memalukan Anggota Dewan Ramai-Ramai Korupsi" pada tanggal 4 September 2018 pukul 11.15 WIB. Isi berita yang disampaikan mengenai anggota DPRD Kota Malang yang ditetapkan sebagai tersangka yang dilengkapi dengan fakta mengenai rekor buruk wakil rakyat yang korupsi di daerah lain. Kondisi ini sudah menjadi umum yang menerpa kalangan aparat

pemerintahan. Hal ini senada dengan apa yang dinyatakan oleh bahwa kasus korupsi yang banyak melanda aparat pemerintah saat ini telah menjadikan reputasi lembaga terbawa-bawa, padahal tidak semua aparat sipil negara tersebut sebagai pelaku tindakan korupsi.

Mental korupsi di kalangan pejabat pemerintahan sebenarnya sudah dilakukan pencegahan sedini mungkin dengan program-program yang berbasis teknologi informasi yang dibangun oleh pemerintah tetapi tetap saja bisa "diakali". Padahal, KPK sebagai lembaga publik supervisi sejak 2002 di bidang pemberantasan korupsi sudah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan terhadap para koruptor yang ada di Indonesia. Namun, hasilnya masih tetap saja para pejabat pemerintahan ada saja yang tertangkap. Saat ini, dengan adanya korupsi yang dilakukan oleh para pejabat legislatif dapat mengganggu sistem tata kelola pemerintahan di kota Malang yang membutuhkan pergantian antar waktu (PAW) bagi anggota DPRD yang terlibat korupsi. Hal ini dipertegas oleh peneliti *Indonesian Corruptions Watch* (ICW) Divisi Korupsi Politik, Almas Sjafrina yang menyampaikan penilaian terhadap perbuatan para anggota DPRD dapat membuat jalannya pemerintahan di daerah terganggu dan merupakan tanggung jawab partai politik.

Pada pukul 17.54 WIB di hari yang sama Detik.com mengeluarkan berita dengan judul "Ini Fraksi Terbanyak Anggotanya Tersangkut Korupsi Massal Kota Malang". Pemberitaan tersebut pada intinya menyampaikan data bahwa anggota fraksi PDIP mendominasi jumlah anggota DPRD Malang yang terjerat kasus korupsi dibanding dengan partai politik lain yang berjumlah 9 anggota yang terjerat kasus korupsi dari 11 kader yang menduduki kursi wakil rakyat di Kota Malang. Posisi kedua, ditempati PKB, Partai Demokrat dan Partai Golongan Karya yang masing-masing 5 kadernya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Pada tanggal 5 September, Detik.com kembali merilis berita dengan judul "Pecat Kader DPRD Malang, PDIP Dukung KPU Larang Eks Koruptor Nyaleg". Di dalam pemberitaan ini berisikan pernyataan dari Eva Kusuma Sundari selaku Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP yang menyatakan bahwa PDIP langsung memecat para anggota yang terbukti korupsi di DPRD Malang. Pemecatan ini sebagai komitmen serius PDIP terhadap perang melawan korupsi dan PDIP mengajukan surat pergantian antar waktu (PAW) untuk empat kadernya.

Keempat berita ini pun menjadi salah satu pusat perhatian masyarakat Indonesia yang dimuat oleh media massa maupun yang dimuat dalam situs web Detik.com, *official twitter account* Detik.Com. Media online Detik.com memiliki *following* sebanyak 28 dan *followers* sebanyak 14,9 juta. Dengan jumlah pengikut yang begitu banyak, pemberitaan mengenai korupsi anggota DPRD Kota Malang menimbulkan berbagai respon dari para pengguna Twitter. Dari sejumlah dampak yang ditimbulkan dari pemberitaan tersebut adalah

adanya ragam komentar atau pernyataan di kalangan masyarakat terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh Anggota DPRD Malang periode 2014-2019, antara lain, *Pertama*, dari @Sudjiwotedjo: "Yang terbanyak dari fraksi apa? Begitu biasanya orang tanya kalau ada korupsi berjamaah. Maka Tuhan mempermudahnya dalam kasus di DPRD Kota Malang. 41 dari 45 orang jadi tersangka. Ya sudah, tinggal googling aja apa partai mayoritas di parlemen itu. Bersyukurlah atas kemudahan ini"; *Kedua*, dari @abylumme: "Salut buat PDIP (y)"; *Ketiga*, dari @akunugraha17: "Partai yang dulunya jelekin Pak Harto dengan segala macam yang katanya korupsi (bahkan sampai saat ini hukum belum bisa membuktikannya), ehh after reformasi menjadi juara korupsi (dengan segala bukti hukum)"; *Keempat*, dari @Randuasri1704: "Harusnya PDIP dibubarkan karena gembong koruptor, partai juara koruptor"; *Kelima*, dari @Piedthom: "Y hrs pecat dong... buat apa orang-orang2 itu di pakai. Masih byk di luar sana yg lebih baik dan cerdas.."; *Keenam*, dari @Andarsuhendar: "Sudah muak rasanya tiap hari di suguhi berita yang maling uang rakyat, segerombolan lagi, hebat wakil rakyat malang"; dan yang *Ketujuh*, dari @Ridwan12122240: "Ga heran, mereka (PDIP) sdh terbiasa korupsi".

Beberapa komentar tersebut di atas memberikan pengaruh terhadap citra organisasi, khususnya citra PDIP. Hal ini senada dengan apa yang dinyatakan oleh suatu informasi yang berupa berita dan sejenisnya termasuk komentar berita yang dikonstruksi negatif secara terus menerus dapat memberikan pengaruh negatif pula di dalam benak pembaca. Sebagai partai yang paling banyak anggotanya terlibat kasus korupsi di DPRD Kota Malang, secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra PDIP. Sahat Sahala selaku Ahli Riset Media Departemen Media Massa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran yang mengatakan bahwa isi berita yang dimuat oleh Detik.com mengenai korupsi anggota DPRD Kota Malang termasuk sebagai kategori berita buruk bagi organisasi yang dapat berimbas pada citra organisasi. Apalagi kalau pola pemberitaannya dilakukan intensif, berulang-ulang dan berhari-hari yang dapat mempengaruhi logika berpikir. Sebaliknya, apabila berita itu bagus maka citra organisasi akan ikut terbawa bagus. Citra itu sendiri menurut adalah kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. Dengan adanya pemberitaan, sesungguhnya media massa sedang membangun opini publik dari suatu organisasi yang diberitakan. Sehingga organisasi yang diberitakan akan merasa citra organisasinya positif atau negatif tergantung dari "racikan" media massa dalam menyampaikan objek pemberitaan secara *cover both side*.

Pendapat serupa dikatakan oleh Ari Agung Prastowo selaku pengamat humas politik Departemen Korporasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran yang mengatakan bahwa diakhir pemberitaan itu, Detik.com menitikberatkan pada PDIP yang harus

menanggung resiko sebagai partai penguasa yang akan menjadi titik perhatian lebih dari rekan-rekan media. Dan seharusnya tim komunikasi PDIP lebih siap dalam *handle* media dalam penyampaian informasi organisasi mengenai korupsi. Sebuah partai politik, seperti PDIP tentu melakukan komunikasi politik dalam setiap aktivitas politik yang dilakukan, baik dalam segi pemikiran politik, pembicaraan politik dan tindakan politik. Hal ini dipertegas oleh yang menyebutkan bahwa pembelaan secara politik melalui penyampaian pernyataan politik oleh pengurus partai politik merupakan bentuk respon terhadap permasalahan yang terjadi yang menimpa suatu partai politik, seperti kasus korupsi.

Kondisi realitas korupsi anggota DPRD asal PDIP ditanggapi oleh pengurus PDIP yang kemudian segera menanggapi pemberitaan tersebut dan mengambil langkah strategis secara cepat agar masyarakat tidak memandang PDIP sebagai partai politik yang membiarkan begitu saja anggotanya melakukan tindakan korupsi tanpa adanya hukuman atau sanksi nyata. Tindakan PDIP seperti ini diperkuat oleh pernyataan dari yang menyebutkan bahwa partai politik sangat berkepentingan dalam pembentukan citra politik melalui komunikasi politik, sebagai upaya menciptakan stabilitas sosial dengan memenuhi tuntutan rakyat. Disisi lain, Eva Kusuma Sundari selaku Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP mengatakan bahwa kali ini PDIP kecolongan oleh oknum-oknum yang melakukan tindakan korupsi. Tindakan korupsi merupakan penyakit umum, semua partai, untuk saat ini PDIP kebobolan satu di lokal dengan nilai kecil. Bagi PDIP, citra bagi partai politik merupakan hal yang penting.

Mempertahan citra organisasi perlu dilakukan mengingat media massa sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik yang kemudian akan membuat masyarakat bersikap dalam menanggapi sebuah berita yang mereka terima. Hal ini pun tidak terlepas dari pengaruh media massa, sering kali opini media massa akan menjadi opini publik. Dalam pembentukan opini publik, media massa memegang peranan penting, karena media massa pada umumnya terlibat dalam pembuatan wacana politik dengan mengonstruksi dan mendekonstruksi peristiwa-peristiwa politik. Selain itu, media massa dalam komunikasi politik sering kali tidak hanya bertindak sebagai "mediasi politik", melainkan juga sebagai agen politik yang berafiliasi dengan suatu kekuatan politik. Dalam konteks ini, media massa bahkan dapat membentuk wacana publik, baik wacana yang dibentuk oleh opini publik itu sendiri melalui media maupun opini yang dibentuk oleh media untuk publik. Sebagaimana setiap pribadi memiliki karakteristik kepribadian tersendiri, maka setiap institusi media massa juga memiliki masing-masing karakteristik dalam mempublikasikan suatu fenomena menjadi berita, tidak terkecuali media *online* seperti Detik.com.

Secara praktis Alexa.com sebagai perusahaan yang menyediakan *traffic web* dan *rangking web*, yang menyebutkan Detik.com

merupakan media *online* yang paling banyak dikunjungi oleh pembaca berita di Indonesia dengan menduduki peringkat nomer 1 diantara media *online* lain dan menduduki peringkat 4 dibawah Google.co.id, Google.com dan Youtube.com sebagai kategori top *website* yang dikunjungi per Januari 2018. Selain itu, berdasarkan pengamatan penulis, Detik.Com merupakan media *online* yang terpercaya karena berafiliasi dengan Trans Corp. yang bergerak di industri penyiaran pertelevisian yang salah satunya memproduksi berita.

Dalam analisis framing yang menjadi titik fokus adalah melihat bagaimana suatu media menkonstruksi realitas. Menurut Sobur (gagasan tentang framing pertama kali dilontarkan oleh Baterson tahun 1955 yang dimaknai sebagai struktur konseptual atau seperangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan publik, kebijakan dan wacana dengan menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada tahun 1974, yang mengandaikan frame sebagai kepingan-kepingan perilaku (*strips of behavior*) yang membimbing individu dalam membaca realitas. Lebih spesifik bagaimana media membingkai peristiwa dalam konstruksi tertentu yang terus dikembangkan di benak masyarakat.

Keberadaan suatu berita kini tidak hanya dimiliki oleh media massa, namun sejak berkembangnya teknologi informasi, berita sudah dikemas pada media *online*. Sehingga informasi atau realitas yang dijadikan sebagai objek berita kini bukan hanya di media massa melainkan juga di media *online*. Sehingga praktik berita di media sosial dapat dikaji secara analisis framing untuk mendapatkan cerita yang dikemas oleh redaksi mengenai suatu peristiwa.

Untuk mengetahui maksud dalam penelitian masalah pemberitaan di media *online* Detik.com ini menggunakan metode analisis framing. Analisis framing ini merupakan salah satu alternatif model analisis yang dapat mengungkap rahasia dibalik semua perbedaan media dalam mengungkapkan fakta. Analisis framing melihat bagaimana fakta itu ditulis, hal ini berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, maupun judul suatu teks. Analisis *framing* dipakai dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media *online* Detik.com. Melalui analisis *framing* akan dapat diketahui siapa mengendalikan siapa, siapa lawan apa, mana kawan mana lawan, mana patron mana klien, siapa diuntungkan dan siapa dirugikan, siapa menindas dan siapa tertindas, dan seterusnya. Kesimpulan-kesimpulan ini sangat mungkin diperoleh karena analisis *framing* merupakan suatu seni kreativitas yang memiliki kebebasan dalam menafsirkan dengan menggunakan teori dan metodologi tertentu (Eriyanto 2012, vi). Lebih lanjut, konsep *framing* oleh Entman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi isu dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. *Framing* dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih

besar daripada isu yang lain. *Framing* memberi tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan atau dianggap penting oleh pembuat teks (Eriyanto 2012, 220).

Dalam ranah studi komunikasi, analisis framing menurut Sudibyo (dalam mewakili tradisi yang mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner untuk menganalisis fenomena atau aktivitas komunikasi. Framing yang merupakan metode penyajian realitas terkait kebenaran tentang suatu kejadian yang tidak dapat diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan penonjolan terhadap aspek-aspek tertentu, dengan menggunakan istilah-istilah yang punya konotasi tertentu dan dengan bantuan foto, karikatur dan alat ilustrasi lainnya (Sudibyo 2001, 186). Adapun model Robert M. Entman memiliki dua dimensi besar yang dapat dijadikan sebagai unit analisisnya yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu dengan konsepsi yang merujuk pada: pendefinisian masalah, memperkirakan masalah, membuat keputusan moral dan menekankan penyelesaian masalah. Melalui model ini, peneliti bermaksud ingin mengetahui bagaimana Detik.com dalam mendefinisikan masalah, memperkirakan penyebab, membuat keputusan moral peristiwa korupsi massal DPRD Kota Malang di empat berita edisi 3-5 September 2018 serta untuk mengetahui *framing* pemberitaan tersebut dalam mengonstruksikan citra PDIP.

DISKUSI

Pada berita berjudul "Miris! 41 dari 45 Anggota DPRD Malang Jadi Tersangka" 3 September 2018, pendefinisian masalahnya adalah fenomena yang membuat miris hati. Perkiraan penyebab pada berita ini adalah suap dan gratifikasi oleh Walikota Malang nonaktif, Moch Anton. Adapun secara keputusan moralnya adalah korupsi dapat dilakukan secara massal dan melibatkan berbagai unsur yang menyebabkan miris hati masyarakat. Penekanan penyelesaian adalah anggota DPRD seharusnya melakukan fungsinya secara maksimal, beberapa fungsi tersebut adalah fungsi pengawasan, anggaran dan regulasi.

Hasil analisis pada berita dengan judul "Miris! 41 dari 45 Anggota DPRD Malang Jadi Tersangka Korupsi" ditemukan bahwa pemilihan fakta yang ditampilkan oleh wartawan dalam berita ini adalah hal apa saja yang diucapkan oleh Basaria Panjaitan selaku Wakil Ketua KPK. Fakta ini dimasukkan karena memiliki *human interest* dan nilai berita serta kebaruan informasi dari kasus korupsi massal DPRD Kota Malang. Dalam berita ini, informasi hanya berisikan dari pernyataan yang dikemukakan oleh KPK. Selain itu, fakta lain yang dimasukkan pada berita ini adalah jumlah total dari kasus korupsi massal ini, yaitu 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka. Fakta lain yang dimasukkan oleh wartawan pada berita ini adalah nominal uang yang dikorupsi. Profesi wartawan akan semakin "mulia" apabila dapat

memberikan informasi fakta yang bersumberkan dari data primer. Adanya tuntutan wartawan harus profesional, maka wartawan harus bisa bekerja sama dengan kolega mereka dari platform media yang berbeda. Pada akhirnya, wartawan harus bisa mencari dan menyampaikan informasi dengan cepat dalam waktu riil (*real time*) agar bisa bersaing dengan media lain.

Penonjolan aspek tertentu dapat terlihat pada penggunaan gambar pada berita ini. Gambar yang dipilih adalah gambar Basaria Panjaitan selaku Wakil Ketua KPK. Ilustrasi Basaria Panjaitan yang sedang mengucapkan sesuatu hal dipilih sebagai gambar pada berita ini untuk merepresentasikan fakta pada berita. Berita akan lebih menonjol yang bersifat "*eye catching*" untuk dapat dilihat dan menjadi perhatian dari pembaca dan dengan sendirinya akan terkonstruksi bahwa fakta yang dipaparkan merupakan data yang valid karena diilustrasikan diucapkan langsung oleh Basaria Panjaitan yang diambil dari *press conference* yang dilakukan oleh KPK. Pemilihan gambar Basaria Panjaitan akan mengonstruksikan bahwa berita ini dapat dipercayai karena fakta diucapkan langsung oleh Wakil Ketua KPK. Sahat Sahala mengatakan gambar pada berita satu itu dari sumber berita dan terbilang relevan.

Dengan menekankan pada kata-kata bahwa anggota dewan dari fraksi tertentu menerima uang dengan nominal kisaran Rp 12,5 juta sampai Rp 50 juta. Selain itu, daftar 41 anggota dewan juga ditonjolkan pada berita ini namun belum dengan asal partainya. Melalui penonjolan pernyataan Basaria Panjaitan, Detik.com terkesan ingin memberikan kesan bahwa tindakan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Malang sangat memprihatinkan, apalagi ini dilakukan secara massal. Menurut Sahat Sahala, pada berita satu, 'miris' itu sudah pandangan subjektif wartawan dan simpulannya karena dia merasa miris. Karena 'miris' ini adalah penilaian dari wartawan yang bersifat heuristik. Penilaian heuristik adalah penilaian yang berlangsung secara otomatis dan cepat dalam menilai suatu kalimat atau pesan yang telah dibingkai .

Pada berita berjudul "Fenomena Memalukan Anggota Dewan Ramai-Ramai Korupsi" 4 September 2018, pendefinisian masalahnya adalah tidak jera-jeranya anggota dewan melakukan korupsi dan menciptakan fenomena korupsi yang dilakukan secara massal dan memalukan. Perkiraan penyebab pada berita ini adalah para anggota Dewan yang masih saja melakukan tindakan korupsi bahkan secara bergerombolan. Keputusan moralnya adalah fenomena memalukan dan memprihatinkan karena mereka wakil rakyat tapi malah menyelewengkan kepercayaan rakyat. Penekanan penyelesaian adalah untuk pembenahan jangka panjang, prapol juga penting melakukan evaluasi buruknya kinerja anggota di DPRD Kota Malang.

Hasil analisis pada berita dengan judul "Fenomena Memalukan Anggota Dewan Ramai-ramai Korupsi" ditemukan bahwa pemilihan fakta yang kemudian ditampilkan oleh wartawan dalam berita ini

adalah pemaparan kasus-kasus korupsi yang pernah dilakukan oleh anggota dewan legislatif yang dilakukan secara massal melibatkan banyak anggota. Pemilihan fakta ini menurut Dhani Irawan selaku wartawan Detik.com yang membuat berita ini adalah:

“Berita ini ditulis dari perwujudan tidak kapoknya anggota dewan korupsi di wilayah legislatif”.

Fakta tersebut dipilih untuk memberikan gambaran kepada khalayak bahwa sampai pada saat ini, anggota dewan nyatanya masih saja melakukan tindakan korupsi. Hal tersebut pun dapat terlihat dengan data kasus korupsi yang terdapat pada berita ini. Antara lain, kasus korupsi DPRD Sumatera Utara, DPRD Riau, dan DPR periode 1999-2004. Pada berita ini, pemilihan fakta lain yang dapat terlihat ada dengan adanya pernyataan dari peneliti ICW Divisi Korupsi Politik, Almas Sjafrina. Pernyataan Almas Sjafrina yang dimasukkan ke dalam berita ini adalah “Ini fenomena yang memalukan dan memprihatinkan”. Pengutipan pernyataan Almas dinilai oleh Detik.com sebagai fakta yang perlu dimasukkan kedalam berita. Karena Detik.com sebagai media *online* tidak dapat mengatakan keprihatinannya terhadap kasus korupsi massal ini, jadi pemilihan ICW selaku organisasi independen dan memang berada dilingkup pemerhati korupsi di Indonesia menjadi pilihan, terlebih ICW dan Detik.com memiliki kesamaan visi dalam melihat kasus korupsi massal ini.

Realitas yang dikonstruksikan Detik.com pada berita ini adalah fenomena memalukan yang dilakukan oleh anggota dewan, bukannya bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan, namun malah bekerja sama dalam korupsi. Selain itu perlu adanya tindakan nyata untuk menyikapi kasus ini juga ditekankan oleh Detik.com.

Penonjolan aspek tertentu dapat terlihat pada penggunaan gambar pada berita ini. Gambar yang dipilih adalah kumpulan uang yang diberikan kepada seseorang namun dengan posisi tangan dibawah dan terbalik. Gambar ini mengisyaratkan bahwa tindakan korupsi dilakukan secara diam-diam dan dilakukan dengan kasadaran untuk memuluskan suatu tujuan. Pemilihan gambar ini menurut Dhani Irawan selaku wartawan yang membuat berita mengatakan bahwa:

“Pemilihan foto dan kata disesuaikan dengan konteks pemberitaan”.

Sahat Sahala menilai penggunaan ilustrasi gambar pada berita ini sebagai gambar ilustrasi, berarti setiap orang bebas menafsirkan. Jadi tergantung pengetahuan untuk menafsirkan. Sedangkan Fajar Pratama selaku Redaktur Pelaksana Detik News mengatakan bahwa:

“Kami dalam momentum ini memaparkan bahwa anggota dewan ini tuh gak kapok-kapok dalam melakukan korupsi. Pertama, melakukan korupsi saja itu sudah memalukan. Kedua, korupsi massal lebih memalukan. Ketiga, lebih memalukan lagi karena diulang-ulang”.

Penonjolan yang dilakukan pada berita ini juga dapat terlihat dari pernyataan yang diucapkan oleh Almas Sjafrina dari ICW. Detik.com

memilih ICW karena sebagai media *online* tidak dapat berbicara sembarangan. Maka dari Detik.com memilih ICW karena memiliki pandangan yang serupa yang sejalan dengan visi Detik.com untuk memaparkan adanya kebobrokan moral pada anggota dewan.

Berdasarkan hal tersebut, khalayak dapat merasakan citra yang dikonstruksikan dari pemberitaan ini, yaitu adanya upaya Detik.com untuk mengonstruksikan bahwa tindakan korupsi massal yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang adalah sebagai fenomena yang memalukan terbukti dari penonjolan aspek-aspek yang terdapat dalam berita. Secara konsep citra dengan sengaja dibuat dan dibentuk agar dapat bernilai positif, karena pencitraan merupakan salah satu langkah dalam menampilkan sosok objek yang dipergunakan untuk meraih dukungan dari publik. Sahat Sahala mengatakan bahwa penggunaan diksi 'memalukan' itu tidak baik dalam dunia jurnalistik, apalagi digunakan dalam sebuah judul pemberitaan. Karena 'memalukan' ini adalah penilaian dari wartawan.

"Memalukan itu juga sudah pandangan subjektif wartawan dan simpulannya karena dia merasa ini fenomena yang memalukan. Jadi, dalam penulisan berita, si wartawan apalagi dalam judul, tidak boleh memasukkan opini pribadi".

Pada berita berjudul "Ini Fraksi Terbanyak Anggotanya Tersangkut Korupsi Massal Kota Malang" 4 September 2018, pendefinisian masalahnya adalah fraksi PDIP mendominasi korupsi massal yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Malang. Perkiraan penyebab adalah 9 dari 11 kader PDIP yang menjadi Anggota DPRD Malang menerima suap dari Walikota Malang nonaktif. Keputusan moral pada berita ini adalah adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh PDIP berupa PAW dan pengunduran diri dari tersangka. Penekanan penyelesaian adalah PDIP melakukan PAW untuk kadernya yang menjabat sebagai anggota DPRD Kota Malang.

Pada berita berjudul "Ini Fraksi Terbanyak Anggotanya Tersangkut Korupsi Massal Kota Malang" pemilihan fakta yang ditampilkan oleh wartawan dalam berita ini adalah PDIP sebagai partai yang paling mendominasi anggotanya tersangkut korupsi massal di DPRD Kota Malang. Fakta yang disajikan pada berita ini bahwa PDIP mendominasi dikarenakan DPRD Kota Malang memiliki 45 kursi, dari hasil pemilu 2014, PDIP memiliki kursi mutlak yakni sebanyak 11 kursi dan mendapatkan jatah Ketua DPRD. Fakta yang dimasukkan disini selain jumlah PDIP yang mendominasi dalam kasus korupsi massal, hanya pemaparan statistik dari partai PKB, Demokrat dan Golkar yang menempati posisi kedua dengan jumlah masing-masing 5 kadernya menjadi tersangka. Posisi ketiga dan seterusnya tidak dimasukkan. Pada berita ini hanya terdapat pernyataan dari I Made Rian selaku Ketua DPC PDIP Kota Malang dan tidak ada pernyataan dari DPC parpol lainnya. Fakta yang ditampilkan dari pernyataan I Made Rian adalah langkah cepat yang dilakukan PDIP, yaitu mengajukan surat pergantian antar waktu (PAW). Realitas yang dikonstruksikan oleh

Detik.com pada berita ini adalah PDIP sebagai partai politik yang kadernya paling banyak terlibat kasus korupsi Massal DPRD Kota Malang dibanding dengan partai politik lain dari paparan statistik pada berita ini. Fajar Pratama selaku Redaktur Pelaksana DetikNews mengatakan bahwa:

“Kami memaparkan statistik. Ini loh fraksi yang paling banyak anggotanya jadi tersangka. Karena statistiknya begitu, terserah pembaca akan menghakimi PDIP atau partai lain”.

Penonjolan aspek tertentu pada berita dapat terlihat pada penggunaan gambar pada berita ini. Gambar yang dipilih adalah gambar 11 anggota fraksi PDIP yang menjadi anggota DPRD Kota Malang. Pemilihan gambar tersebut menurut Fajar Pratama selaku Redaktur Pelaksana Detik News adalah hal yang wajar, karena fraksi PDIP yang paling banyak korupsi jadi yang digunakan adalah gambar PDIP. Terlebih karena konteksnya mengani kasus korupsi massal DPRD Kota Malang, dengan menampilkan visualisasi wajah dari 11 anggota dewan dari PDIP ini khalayak dapat mengetahui seperti apa perangai mereka.

Sahat Sahala mengatakan bahwa pada berita ini sudah menunjukan ke sebuah parpol, yaitu PDIP sebagai fraksi terbanyak yang anggotanya menjadi tersangka kasus korupsi massal DPRD Kota Malang. Dalam berita ketiga, dimuat foto dari tapi tidak diberikan keterangan fotonya. Setiap foto di dunia jurnalistik itu harus ada keterangan foto, jadi kita tidak tahu orang yang ada di foto itu siapa jika tidak ada keterangan fotonya. Pada berita tiga, kalau dengan foto seperti ini yang digunakan, boleh dikatakan si media ini sudah menghakimi PDIP. Itu tidak boleh karena pengadilan oleh wartawan itu tidak boleh. Padahal itu baru tersangka, bukan belum divonis karena masih ada peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Di mana lembaga yudikatif ini bertugas untuk mengadili para warganya yang diindikasikan dan terjadi tersangka tindak pidana korupsi di lembaga pemerintahan.

Selain itu penonjolan pada berita ini dapat terlihat pada pemaparan statistik. Hanya dua besar partai yang ditampilkan, PDIP sebagai partai yang mendominasi pada kasus korupsi massal DPRD Kota Malang ini dengan jumlah 9 anggota, kemudian di posisi kedua terdapat partai PKB, Demokrat dan Golkar yang masing-masing 5 anggota tiap partai. Tidak ada pemaparan statistik partai lain pada posisi ketiga dan seterusnya.

Pada berita berjudul “Pecat Kader DPRD Malang, PDIP Dukung KPU Larang Eks Koruptor Nyaleg” 5 September 2018, pendefinisian masalah adalah PDIP menjadi penyumbang tersangka terbanyak di kasus korupsi massal DPRD Kota Malang. Perkiraan penyebab adalah karena 9 kader PDIP menjadi tersangka kasus korupsi massal DPRD Kota Malang dan membuat PDIP menjadi fraksi yang paling banyak anggotanya menjadi tersangka kemudian direspon PDIP memecat sembilan kadernya. Keputusan moralnya adalah PDIP langsung

memecat sembilan kader yang menjadi tersangka. Penekanan penyelesaian adalah melakukan pemecatan dan seleksi kader dan bakal caleg PDIP.

Pada berita ini berjudul "Pecat Kader DPRD Malang, PDIP Dukung KPU Larang Eks Koruptor Nyaleg" pemilihan fakta yang kemudian ditampilkan oleh wartawan dalam berita ini ada langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh PDIP dalam menyikapi permasalahan korupsi massal DPRD Kota Malang yang menjerat kadernya. Andhika Prasetya selaku wartawan mengatakan bahwa:

"PDIP memberikan keterangan pers dan fakta yang saya masukan berasal dari semua kalimat yang narasumber berikan. Tapi karena waktu itu lagi ramai pemberitaan larang eks napi korupsi, jadi saya buat dua premis dalam satu judul berdasarkan quote narasumber".

Dari realitas yang kompleks dan beragam, aspek yang diseleksi untuk ditampilkan adalah langkah pemecatan sembilan kader yang menjadi tersangka Bagian berita yang dimasukkan adalah seluruh quote dari narasumber pada berita ini, yaitu Eva Kusuma Sundari selaku Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP. Bagian yang ditampilkan dalam berita ini antara lain aspek langkah-langkah yang dilakukan PDIP dari korupsi massal DPRD Kota Malang ini, yaitu mendukung PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pelarangan mantan napi kasus korupsi untuk jadi calon anggota legislatif kembali. Selain itu terdapat pernyataan Eva Kusuma Sundari yang ditampilkan pada berita ini: "Ini fakta pahit, yang harus kita bedah penyebab dan menghentikan kecenderungan untuk tidak terulang"

Realitas yang dikonstruksikan oleh Detik.com pada berita ini adalah adanya langkah-langkah strategis yang ditempuh oleh PDIP dalam menyikapi permasalahan korupsi massal DPRD Kota Malang yang menjerat kadernya dengan quick response. Pemilihan fakta yang dapat cenderung memberikan ruang untuk PDIP dalam memaparkan solusinya terasa pada berita ini. Hal ini pun selaras dengan pernyataan FX Ari Agung:

"Saya pikir apa yang dituliskan oleh PDIP itu bukan klarifikasi, tapi yang disampaikan oleh PDIP adalah langkah-langkah strategis yang dilakukan kepada anggotanya yang terlibat kasus korupsi".

Menurut Sahat Sahala selaku ahli riset media mengatakan secara menyeluruh bahwa:

"Pemberitaannya ini tidak ada perimbangan berita dari orang yang ditangkap atau dituduh dari DPRD Kota Malang, karena mereka yang terlibat. Disini terlihat, wartawan percaya saja dengan juru bicara dari KPK"

"Jadi berita ini hanya satu sumber, hanya sepihak. Seharusnya kalau pemberitaan yang seperti ini, orang yang dituduh itu seharusnya yang diwawancarai oleh wartawan untuk menanyakan benar atau tidak informasi ini".

Penonjolan aspek tertentu pada berita dapat terlihat pada penggunaan gambar pada berita ini. Gambar yang dipilih adalah gambar Eva Kusuma Sundari selaku Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP. Pemilihan penggunaan gambar ini menurut Andhika Prasetya mengatakan bahwa foto yang dipakai pada berita ini adalah foto narasumber.

Sahat Sahala menilai penggunaan gambar pada berita ini tidak ada masalah yang terlalu menonjol pada penggunaan gambar. "Karena sumber beritanya juga *kan* dari orang yang ada digambar. Relevan dengan beritanya *kan*."

Tujuan dari penerapan gambar tersebut adalah untuk lebih menonjolkan berita, karena isi teks berita ini bersumber dari Eva Kusuma Sundari, maka dari itu gambar yang tepat digunakan adalah gambar orang yang bersangkutan, dengan ilustrasi seperti sedang mengeluarkan pendapat, hal itu seperti memberikan kesan bahwa gambar tersebut diambil ketika melakukan kegiatan percakapan serta memberikan kesan bahwa kata-kata yang terdapat pada isi berita langsung dikatakan oleh yang bersangkutan. Jabatan Eva Kusuma Sundari juga ditempatkan di bawah gambar untuk mengonstruksikan bahwa informasi yang disampaikan bersumber dari orang yang kredibel dari PDIP.

Penulisan fakta dalam berita ini menggunakan penulisan deduktif. Andhika Prasetya menulis berita ini dengan penulisan deduktif memiliki tujuan agar pembaca dapat langsung memahami pesan yang terdapat pada kalimat utama di awal. Hal itu selaras dengan perkataan Andhika yang mengatakan bahwa semakin ke bawah berita, saya memasukkan kalimat pelengkap narasumber. Pada proses pemilihan fakta untuk berita ini, hal apa saja yang dimasukkan dan hal apa saja yang ditiadakan. Andhika mengatakan bahwa semua kalimat yang diberikan narasumber saya masukkan. Kebetulan deduksi yang saya ambil, ditulis di paragraf pertama rilis narasumber. Selain itu, berita ini sebenarnya terdiri dari dua premis. Adapun kedua premis tersebut yang ditonjolkan adalah yaitu pecat kader DPRD Malang dan PDIP dukung KPU larang eks koruptor maju caleg. Hal itu pun selaras dengan pernyataan Andhika yang mengatakan bahwa:

"Pada saat PDIP memberikan rilis, lagi ramai ada pemberitaan wacana larang eks napi korupsi, makanya dua premis (*cmiiw*) saya gabung jadi satu judul berdasarkan quote narasumber".

Kedua premis itu pun digabung menjadi satu berita yang utuh. Dari penggabungan dua premis tersebut dapat dilihat bahwa wartawan memiliki andil dalam menonjolkan aspek tertentu, pada berita ini yaitu langkah-langkah yang dilakukan PDIP dalam menyikapi permasalahan korupsi massal.

Pada berita ini wartawan Detik.com memaparkan langkah apa yang ditempuh oleh PDIP dalam menanggapi permasalahan ini. Hal itu tercermin kalimat pertama pada paragraf satu yaitu PDIP memecat

sembilan kader yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di DPRD Malang, Jawa Timur.

Berdasarkan hal tersebut, khalayak dapat merasakan citra yang dikonstruksikan dari pemberitaan ini, yaitu adanya upaya yang dilakukan PDIP dalam menanggapi permasalahan korupsi massal DPRD Kota Malang. Hal ini pun selaras dengan pernyataan Fajar Pratama selaku Redaktur Pelaksana DetikNews yang mengatakan bahwa:

“Pada berita ini, Detik.com sebenarnya memiliki motif untuk menunjukkan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh PDIP dalam menyikapi permasalahan korupsi massal DPRD Kota Malang yang sedang dihadapinya”.

Framing Pemberitaan “Korupsi Massal” DPRD Kota Malang pada Media Online Detik.com Edisi 3-5 September 2018 dalam mengonstruksikan citra PDIP

Detik.com merupakan media *online* yang secara intensif menerbitkan pemberitaan mengenai korupsi massal DPRD Kota Malang. Pada tahap pertama, persiapan materi konstruksi di Detik.com merupakan tugas dewan redaksi. Salah satu dewan redaksi yang ada di Detik.com adalah Fajar Pratama selaku Redaktur Pelaksana Detik News. Setiap wartawan DetikNews yang telah mendapatkan bahan berita dan membuat berita akan mendistribusikan ke *desk editor*, di sini Fajar Pratama berperan juga sebagai editor. DetikNews memiliki fokus terhadap isu-isu penting, salah satunya adalah politik dan tindakan korupsi.

Ada tiga hal yang penting dalam penyiapan materi konstruksi sosial yaitu keberpihakan media massa kepada kapitalisme, keberpihakan semu kepada masyarakat dan keberpihakan pada kepentingan umum. Menurut Fajar Pratama, dalam konteks pemberitaan korupsi massal DPRD Kota Malang, Detik.com memosisikan diri pada tiga hal tersebut di atas. Namun, pada umumnya Detik.com memiliki keberpihakan kepada kepentingan umum dan keberpihakan kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan pernyataan Fajar Pratama yang mengatakan bahwa alasan Detik.com memberitakan peristiwa korupsi ini adalah:

“Itu merupakan kasus yang ditangani KPK, KPK lembaga penegak hukum, sudah sewajarnya apa yang dilakukan penegak hukum itu diliput oleh media massa. Apalagi ini tingkat nasional peristiwanya, Detik.com media nasional jadi *klop*”.

Serta menurut Fajar Pratama, selaras dengan tujuan Detik.com dalam memberitakan peristiwa korupsi massal DPRD Kota Malang ini yaitu:

“Memberikan sosialisasi dan menginformasikan kepada masyarakat mengenai langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, di sini KPK.

Pada tahap kedua, sebaran konstruksi dilakukan melalui strategi masing-masing media massa. Detik.com memiliki prinsip *real time* dan

kecepatan. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sahat Sahala Tua Saragih yang mengatakan bahwa media *online*, termasuk Detik.com mengandalkan kecepatan, serta memiliki kiat dengan menyajikan berita yang tidak pernah langsung utuh, tetapi faktanya dipotong-potong sama dengan media *online* sejenisnya.

Detik.com merupakan salah satu media yang sebaran konstruksi sosial media massanya termasuk dalam model satu arah. Media sosial merupakan sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain secara daring, yang memungkinkan penggunaannya saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Pada model ini, Detik.com menyodorkan informasi sementara konsumen tidak memiliki pilihan lain kecuali mengonsumsi informasi dari berita korupsi massal DPRD Kota Malang. Prinsip dasar dari sebaran konstruksi sosial media massa adalah semua informasi harus sampai pada pemirsa atau pembaca secepatnya dan setepatnya pada agenda media. Apa yang dipandang penting oleh media, menjadi penting pula bagi pemirsa atau pembaca (Bungin 2011, 212).

Tahap ketiga, tahap pembentukan konstruksi realitas akan memengaruhi pembentukan konstruksi citra. Pada tahap ini, pemberitaan telah sampai pada pembaca dan terjadi pembentukan konstruksi di masyarakat. Pembentukan konstruksi di masyarakat melalui tiga tahap. Pertama, konstruksi realitas pembenaran sebagai suatu bentuk konstruksi media massa yang terbentuk di masyarakat cenderung membenarkan apa saja yang ada (tersaji) di media massa sebagai suatu realitas kebenaran. Kedua, kesediaan dikonstruksi oleh media massa, yaitu sikap generik dari tahap pertama. Bahwa pilihan orang untuk menjadi pembaca dan pemirsa media massa adalah karena pilihannya untuk bersedia pikiran-pikirannya dikonstruksi oleh media massa. Ketiga, menjadikan konsumsi media massa sebagai pilihan konsumtif, yang mana seseorang secara habit tergantung pada media massa. Media massa adalah bagian kebiasaan yang tak bisa dilepaskan (Bungin 2011, 212).

Pembentukan konstruksi citra adalah bangunan yang diinginkan oleh tahap konstruksi. Bangunan konstruksi citra oleh media massa ini terbentuk dalam dua model; (1) model *good news* dan (2) model *bad news*. Bangunan konstruksi citra yang dibangun oleh pemberitaan detik.com ini adalah model *bad news*. Model *bad news* adalah sebuah konstruksi yang cenderung mengkonstruksi kejelekan atau cenderung memberi citra buruk pada objek pemberitaan sehingga terkesan lebih jelek, lebih buruk, lebih jahat dari sesungguhnya sifat jelek, buruk, dan jahat yang ada pada objek pemberitaan itu sendiri. Setiap pemberitaan (disadari atau tidak oleh media massa) memiliki tujuan-tujuan tertentu dalam model pencitraan di atas. Jadi, umpamanya pada kasus pemberitaan kriminal, maka model *bad news* menjadi tujuan akhir, yang mana terbentuknya citra buruk sebagai penjahat, koruptor, terdakwa, maupun buronan (Bungin 2011, 213).

Sahat Sahala Tua Saragih mengatakan bahwa sejauh mana pemberitaan Detik.com dapat mempengaruhi konstruksi citra PDIP ini harus dilihat berdasarkan dari model beritanya. Ia menilai bahwa pemberitaan ini termasuk dalam model *bad news*. Menurutnya kalau dari efek media, kalau sebuah berita termasuk dalam model *bad news* atau berita buruk ya pasti citranya buruk. Hal ini akan berdampak pada konstruksi citra buruk pada PDIP sehingga terkesan lebih jelek, lebih buruk, lebih jahat dari sesungguhnya sifat jelek, buruk, dan jahat yang ada pada objek pemberitaan itu sendiri.

Dalam peristiwa saat ini. Fajar Pratama mengungkapkan bahwa Detik.com memiliki andil yang sangat besar dalam mempengaruhi opini masyarakat. Namun, reaksi yang timbul di masyarakat itu tergantung dari preferensi masing-masing, Detik.com tidak bisa mengontrol respon masyarakat terhadap PDIP dalam pemberitaan ini.

Hal ini pun diungkapkan oleh Andhika Prasetya selaku wartawan Detik.com yang mengatakan:

"Ada andil dari Detik.com dalam membentuk citra institusi melalui sebuah pemberitaan. Karena pemberitaan yang *massive* tentang korupsi menysasar sektor politik. Jika tidak langsung disikapi oleh tiap partai, maka akan berdampak pada citra buruk di Pemilu 2019. Maksudnya, jika partai tidak segera bersikap akan kasus korupsi yang menjerat kadernya akan membuat publik atau pembaca malah *negative thinking* seolah partai tidak bersikap".

Hasil yang ditemukan pada penelitian ini, 90,7% masyarakat percaya bahwa pemberitaan oleh Detik.com dalam kasus korupsi massal ini akan berdampak terhadap opini masyarakat yang cenderung negatif dalam melihat kasus pemberitaan kasus korupsi Massal DPRD Kota Malang ini. Pemberitaan ini pun memberikan efek buruk pada citra PDIP. Hal ini selaras dengan hasil riset, ditemukan bahwa 58,1% responden memandang buruk citra PDIP karena mendominasi pada kasus korupsi massa DPRD Kota Malang.

Tahap keempat dalam teori konstruksi sosial media massa adalah tahap konfirmasi. Konfirmasi adalah tahapan ketika media massa maupun pembaca dan pemirsa memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam tahap pemberitaan konstruksi. Bagi media, tahapan ini perlu sebagai bagian untuk memberi argumentasi terhadap alasan-alasannya konstruksi sosial. Sedangkan bagi pemirsa dan pembaca, tahapan ini juga sebagai bagian untuk menjelaskan mengapa ia terlibat dan bersedia hadir dalam proses konstruksi sosial (Bungin 2011, 216). Pada pemberitaan ini, Eva Kusuma Sundari sebagai Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP memberikan argumentasi dalam menyikapi pemberitaan yang menyangkut PDIP sebagai fraksi terbanyak yang anggotanya terjerat kasus korupsi massal DPRD Kota Malang.

Eva Kusuma Sundari selaku Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP mengatakan bahwa dampak yang dirasakan dari

adanya pemberitaan tersebut adalah adanya reaksi masyarakat yang muncul dalam *tweets* media sosial *Twitter*. Untuk penanganan respon *netizen* yang muncul di *Twitter*, PDIP melakukan beberapa langkah seperti melakukan balasan *tweets*. Eva Kusuma Sundari mengatakan bahwa:

“Saya termasuk sebagai perwakilan dari PDIP yang melakukan hal tersebut dengan akun *twitter* saya dan wawancara resmi dengan awak media. Karena saya memiliki tugas sebagai juru bicara partai dan *influencer* PDIP di Pileg dan Pilpres 2019”.

PDIP menyikapi anggotanya yang terlibat kasus korupsi massal DPRD Kota Malang dengan menunjukkan komitmen sesuai ungkapan Eva Kusuma Sundari yang mengatakan bahwa:

“PDIP sudah menunjukkan komitmen melawan korupsi dengan membangun sistem anti korupsi yang terlembaga, yang puncaknya adalah pemecatan kader”.

“Malang adalah basis PDIP, jadi kalau ada kader-kader PDIP yang tersangkut korupsi, maka sudah banyak kader lain yang siap mengganti mereka, karena antriannya sudah panjang”.

Menurut Mustabsyrotul Ummah Mustofa selaku Pengamat Ilmu Politik dan Akademisi Strategi Komunikasi Politik mengungkapkan bahwa:

“PDIP seharusnya mengakui, karena secara fakta secara data itu tidak bisa ditutupi. Masyarakat tahu bahwa perolehan PDIP di DPRD Malang sudah jelas paling banyak, datanya pun ada dalam empat berita tersebut. Harus diakui, ketika mereka terlibat harus diakui dan kalau PDIP mau meminta maaf ya silahkan saja minta maaf kepada publik Malang, karena ternyata anggotanya atau kadernya melakukan hal sedemikian rupa. Jangan seperti ‘sudah langsung saja proses secara hukum’ padahal hukum itu belum tentu menyelesaikan proses politik. Hal ini dikarenakan persoalan politik dan hukum itu beririsan. Proses hukumnya dijalani dengan penangkapan dan seterusnya. Tapi proses politiknya juga harus ada. Misalnya, dengan mengumumkan siapa saja nama-nama yang terlibat, masuk ke ruang publik supaya publik tahu orang-orang ini terlibat dan mereka dapat uang berapa dan sebagainya”.

Hal itu akan memberikan kesan baik kepada publik bahwa PDIP mau menanggapi kasus ini dengan serius, padahal jika hal itu dilakukan citra buruk yang terkonstruksi dari pemberitaan korupsi massal DPRD Malang yang termasuk dalam model *bad news* ini akan dapat berkurang.

Mustabsyrotul Ummah Mustofa, pemberitaan kasus korupsi massal DPRD Kota Malang ini akan berpengaruh terhadap opini masyarakat. Hal ini tidak akan terlepas dari tindakan apa yang dilakukan oleh anggota dewan. Ketika berbicara mengenai perilaku koruptif, sudah pasti akan menimbulkan kesan negatif. Karena ini kan tindakan yang tidak terpuji. Jika hal ini diberitakan, tentu saja akan

membuat opini masyarakat yang sebelumnya netral bisa aja cenderung negatif, apalagi yang negatif akan semakin negatif.

Konstruksi citra dalam berita yang diterbitkan oleh Detik.com akan memengaruhi benak pembaca berita. Hal yang dapat diketahui dari berita ini adalah konstruksi citra PDIP cenderung negatif karena pemberitaan ini merupakan model *bad news* dengan permasalahan korupsi massal DPRD Kota Malang karena unsur-unsur yang menonjol pada berita ini.

Pemberitaan korupsi massal DPRD Kota Malang tidak memberikan dampak terhadap citra negatif yang signifikan ke PDIP. Menurut Eva Kusuma Sundari untuk saat ini, pemberitaan ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap terbentuknya ketidakpercayaan masyarakat terhadap PDIP. Terlebih untuk citra, hal ini terbukti dari berbagai riset Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019, PDIP memiliki elektabilitas yang tertinggi di antara partai politik yang ada di Indonesia. Jadi tampaknya pemberitaan ini tidak memberikan pengaruh terhadap ketidakpercayaan masyarakat. Hal ini terbukti dengan rilis hasil survei mengenai elektabilitas partai politik tujuh bulan sebelum pemilu 2019 pada (26/9/2018) oleh Indikator Politik Indonesia. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebutkan bahwa PDI Perjuangan masih menjadi partai politik dengan elektabilitas teratas. Sebanyak 22,9% dari 100% responden memilih PDIP dan membuat PDIP masih berada di peringkat pertama dalam survei politik ini.

Langkah represif yang seharusnya dilakukan oleh PDIP pada pemberitaan ini menurut Mustabsyrotul Ummah Mustofa adalah melakukan permintaan maaf yang dimuat dalam pemberitaan tersebut, tapi itu sebagai strategi politik. Kalau PDIP meminta maaf kepada publik Malang, anggota dewannya berperilaku seperti ini dan akan memperbaiki mekanisme dalam internal partai, mekanisme fraksi, PDIP bisa dapat simpati dari masyarakat. Itu posisinya sebagai komunikasi politik. Jika hal ini dilakukan maka akan mengkonstruksikan citra baik karena PDIP mau mengakui kesalahan anggota dewan dari fraksinya sebagai kesalahan partai, sehingga akan memunculkan simpati masyarakat yang akan membuat konstruksi citra PDIP lebih baik di mata masyarakat.

KESIMPULAN

Media *online* Detik.com memaparkan fakta-fakta yang memang ditemukan pada kasus korupsi massal DPRD Kota Malang dengan memasukkan fakta dari sudut pandang KPK dan pengamat korupsi ICW. Penonjolan kedua aspek ini memberikan gambaran bahwa kasus korupsi massal oleh anggota DPRD Kota Malang merupakan kasus yang serius dan akan dapat mengonstruksikan citra yang buruk pada partai yang terlibat pada kasus ini yang dikarenakan oleh pemberitaan ini yang dimana termasuk dalam model *bad news*. Sudah pasti akan membuat citra objek pemberitaannya akan buruk. Terlebih, PDIP

sebagai partai yang paling mendominasi dalam kasus ini mendapat sorotan dari Detik.com. Pada kasus korupsi yang sudah pasti negatif, akan memberikan dampak negatif. Tetapi, Detik.com memberikan ruang untuk PDIP menyuarakan pendapat. Namun, terbukanya ruang tidak dimanfaatkan oleh PDIP untuk menunjukkan iktikad baik melakukan permintaan maaf kepada masyarakat khususnya konstituen yang memilih kesembilan anggota dewan dari fraksi PDIP yang menjadi tersangka korupsi massal DPRD Kota Malang. Maka dari itu, citra PDIP cenderung buruk pada pemberitaan ini, meskipun pemberitaan Detik.com cenderung netral.

REFERENSI

- Bungin, B. (2006). *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hartiana, T. I. P. (2014). Citra perusahaan dalam berita krisis perusahaan. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 2(2), 126–137. Retrieved from <http://journal.unpad.ac.id/jkk/article/view/7379/3382>
- Jefkins, F. (2005). *Public Relations*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Kadekoh, A. S. (2017). Isu Poligami dalam Film Surga yang Tak Dirindukan. *Jurnal Online Kinesik*, 4(2), 7–20.
- Muchtar, K. (2016). Komunikasi politik dan pembentukan citra partai. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(2), 136–147.
- Nurussa'adah, E., & Sumartias, S. (2017). Komunikasi politik partai keadilan sejahtera (pks) dalam keterbukaan ideologi 1. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(1), 43–52.
- Pratopo, W. M., & Kusajibrata, N. (2018). Konvergensi di Ruang Redaksi pada Kelompok Media Tempo. *Jurnal Studi Komunikasi*, 2(1), 103–125. <https://doi.org/10.25139/jsk.v2i1.510>
- Prisgunanto, I. (2018). Pemaknaan arti informasi di era digital. *Jurnal Wacana*, 17(2), 152–162.
- Purwindra, M. B. (2016). Peran Humas Badan pusat Statistik sebagai Pengelola Manajemen Reputasi di Era Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 71–82.
- Saleh, G. (2018). Kampanye Hitam pilgub DKI 2017 : analisis wacana van Dijk pada meme di media sosial. *Jurnal Studi Komunikasi*, 2(3), 322–339. <https://doi.org/10.25139/jsk.v2i3.827>
- Sudibyoy, Agus. (2001). *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LkiS.
- Sulistyasingtyas, I. D. (2004). Pemberitaan di media massa sebagai pembentuk reputasi organisasi. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 1(1), 113–126.
- Tamaka, G. I., & Susanto, E. H. (2013). Pencitraan Aburizal Bakrie melalui iklan televisi. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(1), 32–50.
- Eriyanto. (2012). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS.